



RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA-OPD) T.A. 2019

BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MARET 2019



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Telepon (0561) 736541 Fax. (0561) 730062
PONTIANAK

Kode Pos 78124

KEPUTUSAN PELAKSANA HARIAN KEPALA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : TAHUN 2018
TENTANG

RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2019

PELAKSANA HARIAN KEPALA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 merupakan acuan dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Pelaksana Harian Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
18. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.
- KEDUA** : Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 memuat berbagai program baik rutin/penunjang maupun prioritas yang akan dilaksanakan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2019.
- KETIGA** : Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 terdiri dari enam bab, yaitu : Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun 2017, Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan, Program dan Kegiatan Tahun 2019, serta Penutup.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal Mei 2018

Pih. KEPALA BIRO ORGANISASI



CHASMIATI, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660211 198603 2 007



DAFTAR ISI

RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019

BAB. I.	PENDAHULUAN.	
	A. Latar Belakang	1
	B. Landasan Hukum	1
	C. Maksud dan Tujuan	2
	D. Sistematika Penulisan	3
BAB. II.	EVALUASI PELAKSANAANRENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2017	4
	A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dan Capaian Renstra Biro Organisasi	4
	B. Analisis Pelayanan Kinerja Biro Organisasi	18
	C. Isu-Isu Penting Peyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Organisasi	21
	D. Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah	22
	E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB. III.	TUJUAN DAN SASARAN	
	A. Telaahan terhadap kebijakan nasional	23
	B. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Biro Organisasi	23
BAB. IV.	PROGRAM DAN KEGIATAN	26
BAB. V.	PENUTUP	29



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Kalbar Tahun 2013-2018, yang dimaksudkan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan di bidang penataan organisasi yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Untuk itu, Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar telah menetapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2019 sebagai dasar acuan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik.

B. LANDASAN HUKUM.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Kalbar Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai maksud :

1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Barat.



Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah:

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis; penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Kalbar.
2. Mengarahkan program dan kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Kalbar selama 1 tahun dengan mengacu pada Renstra dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat.

D. SISTEMATIKA PENULISAN.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2017

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Organisasi Tahun 2017 dan Capaian Renstra Biro Organisasi
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Biro Organisasi
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Organisasi
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Biro Organisasi

BAB IV ROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2017

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA BIRO ORGANISASI.

Evaluasi pelaksanaan Renja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Organisasi pada tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini ditetapkan dengan maksud agar dapat tercapai tujuan organisasi dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan tugas rutin Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar dalam satu tahun anggaran melalui beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1.1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- 1.2. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 1.3. Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah;
- 1.4. Penataan dan Pemeliharaan Arsip.

Pada program ini seluruh kegiatan dapat terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini ditetapkan dengan maksud agar Biro Organisasi memiliki Sumber Daya Manusia yang bermutu (berkualitas), mampu bersaing dengan sumber daya lain, sehingga mampu meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia. Dalam program ini terdapat beberapa kegiatan, antara lain :

- 2.1. Pendidikan dan Pelatihan;
- 2.2. Bimbingan Teknis, Workshop dan Sosialisasi;
- 2.3. Jasmani dan Rohani;
- 2.4. Penyusunan Analisis Jabatan.

Semua kegiatan pada program ini terlaksana dengan capaian kinerja 100%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini ditetapkan dengan maksud untuk meningkatkan dan mengembangkan system pelaporan keuangan dan kinerja pada Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar sehingga tercapai tertib administrasi keuangan dan pelaporan kinerja. Dalam program ini terdapat beberapa kegiatan, antara lain :

- 3.1. Penyusunan Laporan Keuangan;
- 3.2. Penyusunan LAKIP;
- 3.3. Penyusunan RENJA;
- 3.4. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ;
- 3.5. Penyusunan RKA dan DPA SKPD.



4. Program Penataan Kelembagaan Pemeritahan Daerah

Program ini terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan, yaitu :

- 4.1. **Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Kalbar.**
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Prov. Kalbar dengan tujuan memperoleh informasi dan data berkaitan dengan hambatan dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing organisasi perangkat daerah.
Target yang ingin dicapai adalah termonitoring dan di evaluasinya 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar. Dari target yang ditetapkan terdapat 42 OPD yang dilakukan monitoring dan evaluasi atau mencapai target sebesar 100% lebih. Dengan dilakukannya monitoring dan evluasi terhadap OPD tersebut akan diketahui efektifitas dari suatu OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- 4.2. **Fasilitasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.**
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi pembentukan susunan perangkat daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nommor 18 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
Target yang ingin dicapai adalah tertata dan tersusunnya Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Dari 14 Kabupaten/kota se-Kalbar semua telah melaksanakan penataan perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan capaian target 100%.
- 4.3. **Pengembangan Kapasitas Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.**
Maksud Kegiatan ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan konseptual staf dalam menyusun dan merumuskan kebijakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperoleh data/informasi yang dipergunakan sebagai vahan referensi untuk merumuskan konsep kebijakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah di provinsi Kalbar.
Target yang ingin dicapai adalah adanya data dan laporan tentang pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan konseptual staf dalam menyusun dan merumuskan kebijakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah.



- 4.4. **Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se-Kalbar**
Maksud Kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Kalbar dan Kabupaten/Kota se-Kalbar dibidang Organisasi. Sedangkan tujuannya adalah agar tercipta sinkronisasi kebijakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan aparatur antara Pemerintah Provinsi Kalbar dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalbar.
Target yang ingin dicapai adalah tersusunnya laporan hasil rekomendasi Rapat Koordinasi.
- 4.5. **Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tupoksi UPT dilingkungan Provinsi Kalimantan Barat**
Kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan data/informasi yang berkaitan dengan UPT Dinas/Badan dalam rangka pelaksanaan penataan kelembagaan UPT melalui penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Fungsi UPT Dinas/Badan Prov. Kalbar. Selain itu dilakukan Rapat Teknis dengan Dinas/Badan serta Kepala UPT berkenaan dengan penyusunan dan penataan kelembagaan UPT di Lingkungan Prov. Kalbar.
Target yang ingin dicapai adalah tersusunnya Rancangan Pergub tentang Kelembagaan UPT Dinas/ Badan di Prov. Kalbar sebanyak 30 Rancangan Pergub, namun realisasi yang dicapai dalam Penyusunan Peraturan Gubernur adalah sebanyak 69 UPT dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- 4.6. **Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Tupoksi UPT dilingkungan Provinsi Kalimantan Barat**
Kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan data/informasi yang berkaitan dengan UPT Dinas/Badan dalam rangka monev dan fasilitasi Tupoksi UPT dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar. Selain itu dilakukan kunjungan ke UPT guna mendapatkan data serta konsultasi ke Pemerintah Pusat mengenai pembentukan UPT dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
Target yang ingin dicapai adalah termonitoring dan terevaluasinya Tupoksi terhadap 65 UPT dilingkungan Prov. Kalbar. Target yang ingin dicapai terealisasi 100%.
- 4.7. **Koordinasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah**
Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan inventarisasi masalah dan solusi dibidang organisasi, menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi ke Kemendagri.
Target dari kegiatan ini adalah tersusunnya 1 (satu) dokumen/laporan pelaksanaan koordinasi tentang penataan kelembagaan perangkat daerah.

5. Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.

Program ini terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan, yaitu :



5.1. Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan.

Maksud dan tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pedoman atau acuan mengenai pengaturan penggunaan Pakaian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar tercipta kederagaman dalam menggunakan pakaian dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Target yang ingin dicapai tersedianya 1 kebijakan bidang ketatalaksanaan, dengan realisasi 100%. Dengan ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pakaian Kerja PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

5.2. Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

Pelaksanaan penyusunan laporan survey kepuasan masyarakat dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Barat.

Sedangkan tujuannya adalah untuk mendorong dan memotivasi unit-unit pelayanan di Prov. Kalbar agar selalu dapat menjaga dan meningkatkan fungsi pelayanannya kepada masyarakat dengan melakukan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kinerja pelayanan yang ada pada unit yang bersangkutan.

Hasil dari kegiatan ini adalah sebanyak 50 Unit Pelayanan Publik/Perangkat Daerah Provinsi dan 11 Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan hasil Survey Kepuasan Masyarakat. Untuk UPP Provinsi ini telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 20 UPP. Dari data hasil SKM didapat bahwa hasil pengukuran SKM oleh unit pelayanan provinsi rata-rata 76,49 dengan kategori kinerja "BAIK". Sedangkan untuk nilai IKM Kabupaten/Kota juga mempunyai mutu pelayanan dengan kategori "BAIK" dengan nilai 77,58. Kedua nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu.

5.3. Monev Penataan Ketatalaksanaan pada Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud sebagai salah satu upaya dalam menjamin terlaksananya ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara benar serta untuk meningkatkan kinerja melalui inventarisasi data mengenai pelaksanaan kebijakan dibidang Ketatalaksanaan yang akan menjadi bahan pengambilan kebijakan menuju terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalbar. Sedangkan tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan bidang ketatalaksanaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten/kota serta secara tidak langsung mendorong Kabupaten/Kota untuk mengimplementasikan peraturan-peraturan dibidang Ketatalaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Monev dilakukan terhadap implementasi peraturan dibidang Ketatalaksanaan antara lain : Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas, serta Standar Operasional Prosedur (SOP). Ke-enam Kabupaten/Kota yang dilakukan Monev antara lain : Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Melawi, Ketapang dan kota Singkawang. Dari 10 Kab/Kota yang ditargetkan



untuk dilakukan monitoring dan evaluasi hanya 6 Kab/Kota yang dilaksanakan atau sekitar 60%.

5.4. Asistensi Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar.

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya konkrit perbaikan proses kinerja organisasi Pemerintah dengan harapan berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta membantu terwujudnya manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif. Sedangkan tujuannya adalah untuk menilai sejauhmana SOP telah dibuat dan disusun sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Dari hasil pelaksanaan asistensi penyusunan SOP, terdapat 20 (dua puluh) SKPD yang sudah menyampaikan Draft SOP ke Biro Organisasi dan telah dikoreksi untuk selanjutnya dikembalikan ke SKPD masing-masing untuk di perbaiki. Hasil ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 20 OPD.

5.5. Fasilitasi Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tujuan dari kegiatan ini adalah terwujudnya penerapan SPM di daerah yang efektif dan efisien dari segi sosialisasi, koordinasi, penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pelaporan.

Dari hasil rapat fasilitasi penyusunan SPM telah tersusun dokumen laporan hasil penyusunan SPM untuk Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. Target kegiatan ini adalah tersusunnya 1 dokumen laporan hasil fasilitasi penyusunan Laporan SPM dengan hasil 100%.

5.6. Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik se-Kalbar.

Maksud dilaksanakannya Monitoring dan evaluasi pelayanan publik adalah sebagai saah satu upaya untuk menjamin terlaksananya pelayanan publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara benar serta untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang akan menjadi bahan pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada 6 (enam) Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Bengkayang, Ketapang, Mempawah, Sekadau, Sambas, dan Kabupaten Sintang. Kegiatan ini hanya mencapai target 60% dari 10 Kab/kota yang dilakukan monitoring, hanya 6 Kab/kota yang dapat dilakukan.

5.7. Fasilitasi Inovasi Pelayanan Publik.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik, mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meingkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dari hasil fasilitasi inovasi pelayanan publik ini terdapat 10 (sepuluh) perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik sesuai dengan



target yang ditetapkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017.

6. Program Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur.

Program ini terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu :

6.1. Pengelolaan Perpustakaan.

Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah dalam rangka lebih mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan Sekretariat Daerah Prov. Kalbar

Kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Menghimpun dan menata buku bahan koleksi Perpustakaan.
- b. Melakukan penyimpanan pelestarian bahan pustaka.
- c. Mengolah dan tata buku perpustakaan sesuai dengan klasifikasinya.
- d. Menjilid bahan pustaka yang rusak.
- e. Menjilid majalah/koran.
- f. Melayanai setiap pengunjung Perpustakaan.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan perpustakaan mulai menerapkan pengelolaan dan pelayanan dengan sistem e-book melalui program p-senayan. Namun belum dapat berjalan efektif dikarenakan kurangnya dukungan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan program tersebut.

6.2. Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional.

Maksud dilaksanakan kegiatan penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Tahun 2017 adalah untuk mendapatkan jumlah dan susunan jabatan, jabatan fungsional yang telah ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional, serta memungkinkan pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat dan atau jabatan.

Tujuan diadakannya penyusunan formasi jabatan fungsional sebagai salah satu persyaratan pengangkatan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat baik melalui mekanisme, pengangkatan pertama, alih jabatan maupun *inpassing*.

Menyampaikan formasi beberapa jabatan fungsional ke instansi pembina sesuai dengan surat yang disampaikan instansi pembina kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat seperti:

- 1) Penyampaian Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) dengan Surat pengantar Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Maret 2017 yang merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/712/SJ tanggal 01 Februari 2017 hal Persiapan Penyesuaian/Inpassing ke dalam jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD).
- 2) Penyampaian Jabatan Fungsional Auditor melalui Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 890/2142/OR-C tanggal 13 Juli 2017 hal



Penyampaian Hasil Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor yang merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: SE-687/JF/1/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

- 3) Penyampaian Usulan seluruh jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 890/3610/OR-C tanggal 22 November hal Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan tindak lanjut dari Surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2/SM.02.02/2017 tanggal 22 Juni 2017 hal Pelaksanaan *Inpassing* Nasional.
- 4) Menyiapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017.

6.3. Fasilitasi dan Penyusunan Formasi PNS dilingkungan Provinsi Kalbar.

Maksud dilaksanakan Penyusunan Formasi PNS pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 adalah untuk memperoleh data yang akan dijadikan bahan dalam perhitungan kebutuhan pegawai sesuai dengan jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan, sehingga mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Formasi ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

Sedangkan tujuan dilaksanakannya Penyusunan Formasi PNS pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah agar Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai beban kerja dan tanggung jawab masing-masing satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Fasilitasi dan Penyusunan Formasi PNS dilingkungan Provinsi Kalbar untuk Tahun 2017 hanya bisa dilaksanakan pada 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Landak, Kota Singkawang, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Melawi.

6.4. Evaluasi dan Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat dilingkungan Pemerintah Prov Kalbar.

Maksud dilaksanakannya Evaluasi dan Penyempurnaan Analisis Kebutuhan Diklat Jabatan Struktural di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat yaitu untuk mengevaluasi dan menyempurnakan informasi tentang kompetensi serta diklat yang seharusnya dimiliki pada setiap jabatan struktural sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai dasar untuk menyusun kebutuhan diklat setiap SKPD.



Kegiatan Evaluasi dan Penyempurnaan Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Latihan Jabatan Struktural di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat dilakukan secara bertahap. Lokus pada Tahun 2017 dengan pendekatan kuantitatif adalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar
- 2) Badan Pengembangan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar
- 3) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalbar
- 4) Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar
- 5) Biro Hukum Setda Prov. Kalbar

6.5. Monev Reformasi Birokrasi.

Maksud dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah untuk memantau pelaksanaan program dan kegiatan dalam 8 (delapan) area perubahan sesuai Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kotadan PMPRB se Kalimantan Barat.

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah:

- a. Mendapatkan gambaran mengenai penyusunan kebijakan terkait reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota;
- b. Mendapatkan informasi mengenai kemajuan pelaksanaan rencana aksi dari setiap bidang perubahan yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi;
- c. Tersedianya bahan perumusan kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Rencana Aksi dalam Road Map Reformasi Birokrasi.

Dari hasil monitoring yang telah dilakukan bahwa Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Road Map Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Kabupaten Sambas Periode Tahun 2013 -2017
2. Kabupaten Landak Periode Tahun 2014 – 2018
3. Kota Pontianak Periode Tahun 2015 – 2019
4. Kabupaten Kubu Raya Periode Tahun 2015 -2019
5. Kabupaten Sekadau Periode Tahun 2015 – 2019
6. Kabupaten Kayong Utara Periode Tahun 2015 – 2019

Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi dalam Peraturan Bupati/Walikota ada 8 (delapan) Kab/Kota.

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/19/M.RB.06/2017 tanggal 16 Februari 2017 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016 bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 adalah **61,90** atau **kategori "B"** yang sebelumnya berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/113/D.I.PANRB-UPRBN/3/2016 tanggal 30 Maret 2017 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 adalah **41,44** atau **kategori "C"**. Terdapat kenaikan



indeks yang sangat membanggakan, sehingga harus tetap dimonitoring dan dievaluasi.

Terkait PMPRB Tahun 2017, Biro Organisasi memfasilitasi pelaksanaan penilaian yang secara teknis dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Hasil Penilaian yang dilakukan Tim Reformasi Birokrasi Prov. Kalbar pada Tahun 2017 dengan melakukan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016 yaitu dengan Indeks Reformasi Birokrasi **82,17** dengan kategori **sangat baik**.

Evaluasi terhadap unit kerja menuju WBK/WBBM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 telah dilakukan oleh Tim Menpan dan RB pada tanggal 7 s.d 8 November 2017. Adapun Instansi yang dievaluasi WBK/WBBM yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Landak.

6.6. Workshop Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan dilingkungan Prov. Kalbar.

Tujuan penyelenggaraan Workshop Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota adalah :

1. untuk membangun sinergitas pemahaman yang sama bagi para analis kepegawaian/analisis jabatan dalam merumuskan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan penataan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia aparatur termasuk untuk kepentingan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
2. memberikan/meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan bagi para peserta workshop yang terdiri dari para pejabat struktural eselon IV yang membidangi aparatur/kepegawaian dan pejabat fungsional membidangi hal yang sama pada SKPD/UPTD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam upaya mewujudkan sistem penataan Manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur sebagaimana termuat di dalam Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2013 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun 2013-2018, bahwa penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) merupakan bagian dari rencana aksi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar sesuai kebutuhan organisasi. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 56 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

6.7. Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan dilingkungan Prov. Kalbar

Tujuan dari pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut :

- a. Untuk membantu dan memudahkan unit kerja dalam melaksanakan analisis jabatan sesuai dengan format-format data serta langkah-



langkah yang akan dilakukan termasuk dalam perumusan hasil analisis jabatan.

- b. Sebagai bahan masukan bagi unit kerja dalam melakukan penataan kepegawaian serta bagi penyempurnaan organisasi dan tatalaksana.
- c. Untuk memberikan kejelasan tentang tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang masing-masing pemegang jabatan baik struktural maupun non struktural guna peningkatan profesionalisme dan kinerja.

Peran Tim Pelaksana Asistensi dan verifikasi Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dimulai dari Verifikasi Jabatan hingga penetapan hasil draft Analisis Jabatan yang disusun oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar sempurna.

6.8. Penyusunan Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar.

Tujuan dari kegiatan Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, antara lain :

- a. Melaksanakan penilaian/evaluasi pada jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai kaidah dan prinsip-prinsip evaluasi jabatan.
- b. Menyusun bobot pekerjaan/nilai jabatan (*job value*) dan peringkat jabatan/kelas jabatan (*job grade/job class*) yang sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi serta analisis jabatan.
- c. Menghasilkan dokumen Evaluasi Jabatan yang telah disempurnakan sesuai peraturan yang berlaku sebagai dasar dari remunerasi/imbalance secara adil, berbasis kinerja dan jabatan yang diemban.

Kegiatan Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilakukan kepada seluruh OPD dan UPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Keadaan sampai dengan 29 Desember 2017, dari 37 OPD dan 9 Biro yang belum menyusun Draft evaluasi jabatan yaitu:

1. Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
2. Biro Pengelolaan Asset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

sedangkan untuk UPT, kondisi status quo sambil menunggu penetapan UPT yaitu dari 61 UPT terdapat 7 UPT yang belum menyusun draft Evjab. Adapun rincian UPT yang belum menyusun draft Evjab yaitu :

1. Unit Pelatihan Kesehatan.
2. Poliklinik Provins.
3. Unit Pelayanan dan rehabilitasi Sosial.
4. Unit Latihan Kerja Industri (entikong)
5. Unit Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor.
6. Sekolah Pertanian pembangunan –Sekolah pertanian Menengah Atas
7. Unit Pengelola Terminal Agribisnis Terpadu.

Sedangkan Dokumen Evjab yang telah dilakukan verifikasi oleh Biro Organisasi adalah sebagai berikut :



1. Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar
2. Biro Kesejahteraan Sosial Setda Prov. Kalbar
3. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar
4. Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Prov. Kalbar
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalbar
6. Unit Pelayanan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Prov. Kalbar
7. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah II
8. Unit Taman Budaya Prov. Kalbar
9. Unit Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pendidikan
10. Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan
11. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mempawah

6.9. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Setda.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan dan penataan administrasi kepegawaian secara efektif dan efisien yang meliputi terwujudnya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara profesional sesuai dengan kebutuhan instansi/organisasi serta terciptanya tertib administrasi dalam penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar.

Sasaran kegiatan adalah seluruh PNS dilingkungan Sekretariat Daerah Prov Kalbar yang mencakup 9 (sembilan) Biro. Kegiatan yang dilakukan antara lain : Usulan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Cuti PNS, Ijin Belanja PNS, Usul Pensiun PNS, Rekapitulasi Mutasi PNS, Ujian Dinas/Penyesuaian Ijazah dan rekap Absensi PNS.

Dari seluruh kegiatan tersebut, telah dilakukan pengelolaan terhadap administrasi Kepegawaian PNS dilingkungan Sekretariat Daerah Prov. Kalbar sebanyak 480 orang PNS.

6.10. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Setda.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mewujudkan dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani PNS sehingga pada gilirannya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas okok dan fungsi. Selain itu untuk membangun solidaritas dikalangan PNS yang tujuannya untuk peningkatan efektifitas kinerja secara optimal.

Sasaran kegiatan adalah seluruh PNS dilingkungan Sekretariat Daerah Prov Kalbar yang mencakup 9 (sembilan) Biro. Kegiatan yang dilakukan berupa Senam Kesegaran jasmani (SKJ) yang diikuti seluruh PNS dilingkungan Sekretariat Daerah Prov. Kalbar yang dilaksanakan setiap hari Jum'at mulai pukul 07.00 s.d 08.00 wiba bertempat di Halaman Komplek kantor Gubernur Kalbar.

7. Program Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan.

Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu :



7.1. Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar Tahun 2016.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui laporan kinerja yang disusun apakah telah sesuai dengan dokumen perencanaan serta strategi yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai wujud komitmen Kepala Daerah dan segenap SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki.

Dari hasil Laporan Kinerja yang disampaikan oleh seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, semuanya telah disusun sesuai dengan Sistematisa yang telah ditentukan. Dukungan hasil Laporan Kinerja seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar sangat mendukung pencapaian hasil penilaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalbar. Ini dapat dilihat dari hasil penilaian Kementerian PAN dan RB terhadap Laporan Kinerja Provinsi Kalbar dimana pada tahun 2015 mendapat nilai 60,85 naik menjadi 63,08 pada tahun 2016 walaupun masih pada predikat "B".

7.2. Penyusunan Klarifikasi / Reviu Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja SKPD Pemerintah Prov. Kalbar

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk mewujudkan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penerapan prinsip-prinsip kepengemrintahan daerah yang baik melalui penusunan dokumen pelaporan dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja (LKj) tahun 2017.

Dari hasil reviu yang dilakukan bahwa seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja dengan baik.

7.3. Fasilitasi Penerapan SAKIP di Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan adalah sebagai media diseminasi informasi kebijakan pengembangan akuntabilitas kinerja guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. Selain itu juga untuk mengetahui gambaran penerapan SAKIP diseluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalbar.

Dari hasil evaluasi terhadap penerapan SAKIP di daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten/kota perlu untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja guna mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bekinerja dan akuntabel. Walaupun demikian seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota telah menerapkan SAKIP dalam peningkatan kinerja didaerahnya.



Berikut ini ditampilkan perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama selama Tahun 2015-2017.

TABEL 2.1
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
SELAMA TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET 2018
			2015	2016	2017	
1.	Tertatanya lembaga perangkat daerah yang proporsional, dinamis, responsif dan akuntabel serta terwujudnya organisasi Perangkat Daerah Kab/ Kota sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi	1. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang di monitoring dan di evaluasi agar tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda
		2. Jumlah data susunan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota
		3. Jumlah data dan laporan tentang pelaksanaan pengembangan kapasitas	3 kali	5 kali	5 kali	3 kali
		4. Jumlah rekomendasi hasil rakor bidang organisasi se-Kalbar	3 kali	5 kali	5 kali	3 kali
		5. Jumlah Rancangan Pergub tentang Kelembagaan UPT Dinas/Badan di Prov. Kalbar	3 kali	5 kali	5 kali	3 kali
		6. Jumlah monitoring, evaluasi dan fasilitasi Tupoksi UPT dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	3 kali	5 kali	5 kali	3 kali
		7. Jumlah Kebijakan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	3 kali	5 kali	5 kali	3 kali
2.	Meningkatnya sistem, prosedur dan standarisasi ketatalaksanaan yang efisien dan efektif serta mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang terstandar dan berkualitas	1. Jumlah kebijakan bidang ketatalaksanaan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 Kebijakan	1 kebijakan
		2. Jumlah UPP yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	15 UPP Pemprov dan Pemkab/kota	15 UPP Pemprov dan Pemkab/kota	50 UPP Pemprov dan Pemkab/kota	15 UPP Pemprov dan Pemkab/kota
		3. Jumlah Kab/kota yang melaksanakan kegiatan Monev penataan ketatalaksanaan	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	10 Kab/Kota
		4. Jumlah SKPD yang menyusun SOP dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	80%	75%	75%	100
		5. Laporan SKPD Pengampu SPM dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen
		6. Jumlah SKPD Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota yang dimonitoring penyelenggaraan pelayanan publiknya	10 Kab/kota	10 Kab/kota	6 Kab/kota	14 Kab/Kota



		7. Jumlah UPP yang melakukan inovasi pelayanan	3 UPP	6 UPP	10 UPP	10 UPP
3.	Terwujudnya pembinaan aparatur formasi PNS, Jabatan Fungsional, tersedianya informasi jabatan, informasi diklat dan Reformasi Birokrasi serta meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur setda, meningkatnya kualitas pelayanan dan pemanfaatan minat baca serta pemanfaatan perpustakaan setda	1. Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan Setda	750 org	750 org	124 org	750 org
		2. Prosentase peningkatan layanan Perpustakaan Setda melalui penyediaan buku-buku bacaan elektronik (e-book)	-	-	80%	100%
		3. Tersedianya susunan Formasi Jabatan Fungsional seluruh Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		4. Tersedianya usulan formasi PNS Provinsi dan Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		5. Jumlah dokumen Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Perangkat daerah Pemerintah Provinsi yang dievaluasi	5 Dokumen	42 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
		6. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Kalbar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		7. Jumlah tenaga analisis penyusunan ANJAB, ABK dan EVJAB yang mengikuti Workhsop	-	84 org	84 org	84 org
		8. Jumlah Dokumen ANJAB SKPD di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar yang disusun	15 SKPD	15 SKPD	15 SKPD	15 SKPD
		9. Jumlah Dokumen EVJAB SKPD di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar yang disusun	15 SKPD	15 SKPD	44 SKPD	15 SKPD
		10. Jumlah Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah prov. Kalbar yang dikelola administrasi kepegawaian	450 org	450 org	480 org	450 org
		11. Prosentase peningkatan kesehatan jasmani PNS melalui kegiatan Senam Kesegaran jasmani di lingkungan Setda	100%	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya sistem Akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam terwujudnya Good Local Governance	1. Persentase SKPD Pemprov yang menyusun Laporan Kinerja dengan baik	80%	85%	90%	100%
		2. Tingkat pemahaman SKPD Pemkab / kota terkait kebijakan pengembangan akuntabilitas kinerja	87%	90%	95%	100%
		3. Persentase Pemerintah kab/ Kota yang menerapkan SAKIP dengan baik	80%	85%	93%	100%



B. ANALISIS PELAYANAN KINERJA BIRO ORGANISASI

Analisis kinerja pelayanan Biro Organisasi berdasarkan hasil kinerja dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran berikut indikatornya sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1.	Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang efisien, efektif dan proporsional serta tepat ukuran sesuai dengan kewenangan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi	1. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang di monitoring dan di evaluasi agar tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	8 OPD	42 OPD	100
		2. Jumlah data susunan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	14 kab/kota	14 Kab/Kota	100
		3. Jumlah data dan laporan tentang pelaksanaan pengembangan kapasitas	1 Laporan	1 Laporan	100
		4. Jumlah rekomendasi hasil rakor bidang organisasi se-Kalbar	1 Laporan	1 laporan	100
		5. Jumlah Rancangan Pergub tentang Kelembagaan UPT Dinas/Badan di Prov. Kalbar	30 rancangan Pergub UPT	69 rancangan Pergub UPT	100
		6. Jumlah monitoring, evaluasi dan fasilitasi Tupoksi UPT dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	65 UPT	65 UPT	100
		7. Jumlah Kebijakan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
Nilai Capaian Sasaran Strategis					100

Program yang mendukung sasaran ini adalah Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dengan kegiatan antara lain :

- 1). Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- 2). Fasilitasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 3). Pengembangan Kapasitas Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 4). Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se-Kalbar.
- 5). Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tupoksi UPT dilingkungan Provinsi Kalimantan Barat.
- 6). Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Tupoksi UPT dilingkungan Provinsi Kalimantan Barat.
- 7). Koordinasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah.



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
2.	Meningkatnya sistem, prosedur dan standarisasi ketatalaksanaan yang efisien dan efektif serta mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang terstandar dan berkualitas	1. Jumlah kebijakan di bidang ketatalaksanaan yang dihasilkan	1 kebijakan	1 Kebijakan	100
		2. Jumlah UPP yang melaksanakan Surey Kepuasan Masyarakat (SKM)	20 UPP	50 UPP	100
		3. Jumlah Kab/kota yang dilaksanakan kegiatan Monev penataan ketatalaksanaan	10 Kab/Kota	6 Kab/Kota	60
		4. Jumlah SKPD yang menyusun SOP dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	20 SKPD	20 SKPD	100
		5. Laporan SKPD Pengampu SPM dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		6. Jumlah SKPD Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota yang dimonitoring penyelenggaraan pelayanan publiknya	10 Kab/Kota dan 20 SKPD	6 Kab/Kota	60
		7. Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	10 Inovasi dari Prov dan Kab/Kota	10 Inovasi Prov dan Kab/Kota	100
Nilai Capaian Sasaran Strategis					88,57

Program yang mendukung sasaran ini adalah Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dengan kegiatan antara lain :

- 1). Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan.
- 2). Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
- 3). Monev Penataan Ketatalaksanaan pada Kabupaten/Kota.
- 4). Asistensi Penyusunan SOP dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar.
- 5). Fasilitasi Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal.
- 6). Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik se-Kalbar.
- 7). Fasilitasi Inovasi Pelayanan Publik.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	(%)
3	Terwujudnya pembinaan aparatur formasi PNS, Jabatan Fungsional, tersedianya informasi jabatan, informasi diklat dan Reformasi Birokrasi serta meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur setda, meningkatnya kualitas pelayanan dan pemanfaatan minat baca serta peman-	1. Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan Setda	750 orang	124 orang	16,53
		2. Prosentase peningkatan layanan Perpustakaan Setda melalui penyediaan buku-buku bacaan elektronik (e-book)	80%	80%	100
		3. Tersedianya susunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100



faatan perpustakaan setda	Formasi Jabatan Fungsional seluruh Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar			
	4. Tersedianya usulan formasi PNS Provinsi dan Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	5. Jumlah dokumen Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Perangkat daerah Pemerintah Provinsi yang dievaluasi	5 Dokumen	5 Dokumen	100
	6. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Kalbar	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	7. Jumlah tenaga analisis penyusunan ANJAB, ABK dan EVJAB yang mengikuti Workshp	84 Orang	84 Orang	100
	8. Jumlah Dokumen ANJAB SKPD di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar yang disusun	15 SKPD	15 SKPD	100
	9. Jumlah Dokumen EVJAB SKPD dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar yang disusun	15 SKPD	44 SKPD	100
	10. Jumlah Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah prov. Kalbar yang dikelola administrasi kepegawaian-nya	450 PNS	480 PNS	100
	11. Prosentase peningkatan kesehatan jasmani PNS melalui kegiatan Senam Kesegaran Jasmani di lingkungan Setda	100 %	100%	100
	Nilai Capaian Sasaran Strategis			92,41

Program yang mendukung sasaran ini adalah Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan antara lain :

- 1). Pengelolaan Perpustakaan.
- 2). Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional.
- 3). Fasilitasi Penyusunan Formasi PNS dilingkungan Provinsi Kalbar.
- 4). Evaluasi Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat dilingkungan Pemerintah Provinsi Prov. Kalbar.
- 5). Monev Reformasi Birokrasi.
- 6). Workshop Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan dilingkungan Prov. Kalbar.
- 7). Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan dilingkungan Prov. Kalbar.
- 8). Penyusunan Evaluasi Jabatan dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar.



- 9). Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Setda.
- 10). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Setda.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
4.	Terwujudnya sistem Akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam terwujudnya Good Local Governance	2. Persentase SKPD Pemprov yang menyusun Laporan Kinerja dengan baik	75%	90%	100
		3. Tingkat pemahaman SKPD Pemkab / kota terkait kebijakan pengembangan akuntabilitas kinerja	75%	95%	100
		4. Persentase Kab/Kota yang menerapkan Sitim AKIP	98%	93%	94,90
Nilai Capaian Sasaran Strategis					98,30

Program yang mendukung sasaran ini adalah Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan kegiatan antara lain :

- 1). Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar.
- 2). Penyusunan Klarifikasi/Reviu Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja SKPD Pemerintah Prov. Kalbar.
- 3). Fasilitasi Penerapan SAKIP di Daerah.

C. ISU-ISU PENTING PEYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BIRO ORGANISASI.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dihadapi di dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan Biro Organisasi adalah sebagai berikut :

1. Dalam upaya peningkatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur terkendala pada permasalahan masih rendahnya sumber daya aparatur manusia antara lain dalam kegiatan penyusunan Formasi PNS terdapat unit kerja yang masih belum memahami perhitungan bezeeting dan pengisian formulir penyusunan formasi PNS, sehingga menghambat usulan formasi PNS, dalam pengumpulan data jabatan kegiatan penyusunan Analisis Jabatan masih belum dilengkapi dengan informasi jabatan yang lengkap, sehingga terdapat kesulitan dalam pengolahan data jabatan. Dalam pelaksanaan fasilitasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar masih terdapat hambatan dalam pengumpulan data, terutama data dari SKPD yang masih kesulitan dalam menuangkan kegiatan reformasi birokrasi pada unit kerjanya masing-masing.
2. Pada program penataan ketatalaksanaan terdapat permasalahan utama yaitu komitmen pimpinan yang masih belum optimal karena dalam penyelenggaraan ketatalaksanaan sudah mempunyai peraturan-peraturan yang sudah terstandarisasi.



3. Pada program Pengembangan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan terdapat permasalahan antara lain Masih ada SKPD maupun Kabupaten/Kota yang belum memahami IKU dengan benar. Sehingga merasa kesulitan pada saat penyusunan LAKIP.
4. Pada penataan kelembagaan pemerintahan daerah terdapat permasalahan antara lain penyampaian data/informasi yang diminta dari Dinas/Badan/UPT tidak tepat waktu.

D. REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Hasil review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa pelaksanaan program dan kegiatan didalam Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun 2017, terdapat penekanan pada 3 (tiga) aspek yaitu :

- a. Evaluasi capaian kinerja digunakan oleh instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan ditahun yang akan datang sehinggadapat memperbaiki kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan penyusunan Laporan Kinerja. Hasil reuiu atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja dan Perjajian Kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroisasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.
- b. Hasil Evluasi menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperoleh nilai 63,13 atau predikat "B" penilaian tersebut menunjukan tingkat efektifitas penggunaan anggaran dibanding dengan capaian kerjanya sudah cukup baik dan juga kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Provinsi Kalimantan Barat sudah menunjukan hasil yang baik.
- c. Secara keseluruhan peyelenggaraan program penataan ketatalaksanaan pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan baik, salah satu kegiatan yang menjadi penilaian Pemeritah Pusat adalah partisipasi dan predikat dalam kompetisi/lomba Inovasi Pelayanan Publik. Pada Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhasil masuk kedalam TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik. Hasil ini belum optimal dan perlu untuk ditingkatkan lagi untuk menjadi yang terbaik. Namun terdapat beberapa kendala untuk mencapai hal tersebut seperti : belum semua Kabupaten/Kota yang dapat dimonitoring dikarenakan keterbatasan anggaran, SDM dan luasnya wilayah penyelenggaraan Pelayanan Publik se-Kalbar.

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi selama ini tidak ada.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 merupakan tahapan transisi dari RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJPD Tahun 2005-2025.

RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 disusun dalam rangka untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan kebijakan pada RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

Ada 7 (tujuh) fokus yang menjadi program prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019, yaitu :

- 1). Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
- 2). Meningkatkan kecerdasan Sumber Daya Manusia.
- 3). Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.
- 4). Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Manajemen Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- 5). Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar.
- 6). Meningkatkan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan.
- 7). Meningkatkan Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Aman, Damai serta Ketahanan Budaya.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BIRO ORGANISASI

1. TUJUAN

Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan, ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk *kuantitatif*, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Diharapkan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan (LAN-RI, 2003:9).

Penetapan tujuan didasarkan pada faktor kunci keberhasilan (analisis SWOT: *Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*) yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi Biro Organisasi. Tujuan organisasi dilaksanakan secara konsisten dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi berdasarkan prinsip kolektifitas, disertai menggambarkan arah strategi instansi dan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan (*key success factor*) dari



hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global.

Untuk itu telah ditetapkan 4 (empat) tujuan strategis, yaitu :

1. Mewujudkan kelembagaan perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/kota yang efisien, efektif, dan proporsional sesuai dengan kewenangan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simpilikasi.
2. Mewujudkan standarisasi, system dan prosedur ketatalaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang terstandar dan berkualitas.
3. Terwujudnya pembinaan aparatur, formasi PNS dan Jabatan Fungsional, tersedianya Informasi Jabatan dan informasi diklat dan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan sumber daya aparatur Setda serta pemanfaatan perpustakaan Setda.
4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka terwujudnya Good Local Governance.

2. SASARAN.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing.

Dengan demikian sasaran strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Untuk itu Biro Organisasi telah menetapkan 4 (empat) sasaran, sebagai berikut :

- 1) Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/kota yang efisien, efektif, dan proporsional sesuai dengan kewenangan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simpilikasi.
- 2) Meningkatnya sistim, prosedur dan standarisasi ketatalak sanaan yang efisien dan efektif serta mendorong penyelenggaraan pelayanan public yang terstandar dan berkualitas
- 3) Terwujudnya pembinaan aparatur formasi PNS dan Jabatan Fungsional, tersedianya informasi jabatan dan informasi diklat dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar serta meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian setda dan kualitas sumberdaya aparatur setda serta meningkatnya kualitas pelayanan



administrasi kepegawaian setda dan kualitas sumberdaya aparatur setda.

- 4) Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka Terwujudnya Good Local Governance.



BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan rencana Program dan Kegiatan tahun 2019 yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) disinkronkan dengan Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur terpilih. Program dan Kegiatan tersebut berupa program penunjang dan program teknis yang terdiri dari antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari :
 - a. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
 - c. Penyediaan Makanan dan Minuman.
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - e. Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar daerah.
 - f. Penataan dan Pemeliharaan Kearsipan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, yang terdiri dari :
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jabatan, Kendaraan dinas/operasional.
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas Angin.
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perengkapan kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang terdiri dari :
 - a. Pendidikan dan Latihan.
 - b. Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop
 - c. Pembinaan Jasmani dan Rohani,
 - d. Penyusunan Analisis Jabatan.
 - e. Penyusunan SOP
 - f. Penyusunan Penetapan Kinerja
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, yang terdiri dari :
 - a. Penyusunan Laporan Keuangan.
 - b. Penyusunan LAKIP.
 - c. Penyusunan RENJA SKPD.
 - d. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ
 - e. Penyusunan RKA dan DPA SKPD.
 - f. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
5. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah, yang terdiri dari :
 - a. Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Aset.
6. Program Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :



- a. Koordinasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah.
 - b. Fasilitasi Penataan Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Prov. Kalbar.
 - c. Pengembangan Kapasitas Dalam Rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi.
 - d. Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota.
 - e. Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se-Kalbar.
 - f. Fasilitasi Kelembagaan UPT dilingkungan Prov. Kalbar.
 - g. Penyusunan Aplikasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota.
 - h. Workshop Sinkronisasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota.
7. Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :
- a. Koordinasi Penataan Ketatalaksanaan.
 - b. Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota
 - c. Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan
 - d. Sosialisasi Bidang Ketatalaksanaan.
 - e. Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal.
 - f. Fasilitasi Evaluasi Penerapan SOP dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar
 - g. Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat.
 - h. Inovasi Pelayanan Publik.
 - i. Pembinaan dan Pengawasan Penyelegaraan Pelayanan Publik se-Kalbar.
 - j. Fasilitasi peningkatan kinerja penyelegaraan pelayanan publik di Prov. Kalbar.
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, yang terdiri dari :
- a. Fasilitasi dan Verifikasi Penyusunan Formasi PNS dilingkungan Pemerintah Prov dan Kab/Kota se-Kalbar.
 - b. Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar.
 - c. Fasilitasi dan Verifikasi Penyusunan ABK dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar
 - d. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov. Kalbar periode 2019-2024.
 - e. Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan diligkungan Pemerintah Prov. Kalbar.
 - f. Fasilitasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ASN diligkungan Pemerintah Prov. Kalbar.
 - g. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Setda Prov. Kalbar.
 - h. Pengelolaan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar.
 - i. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan ANJAB dan Standar Kompetensi Jabatan ASN Kab/Koa se-Kalbar.
 - j. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda Prov. Kalbar.
9. Program Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, yang terdiri dari :



- a. Pembinaan Penerapan SAKIP di Daerah.
- b. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerinah Prov. Kalbar.
- c. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar.
- d. Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar.
- e. Workshop penyusunan cascading kinerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Prov.Kalbar.

Program dan kegiatan tersebut diatas dapat dilihat pada daftar lampiran Rencana Kerja (RENJA) ini.



BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 disusun berdasarkan Pagu Indikatif yang disesuaikan dengan Kebutuhan dan Skala Prioritas Program dan Kegiatan. Rencana Kerja yang disusun ini terdiri dari 9 (sembilan) Program dan 54 (lima puluh empat) kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut bersifat rutin/penunjang serta Program dan Kegiatan yang sifatnya Prioritas. Program dan kegiatan rutin/penunjang ada 5 (lima) Program dengan 21 (dua puluh satu) Kegiatan, sedangkan program dan kegiatan prioritas ada 4 (empat) Program dengan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan.

Untuk mendukung seluruh program dan kegiatan tersebut diperlukan anggaran sebesar Rp 4.500.000.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana Kerja yang disusun ini masih banyak perlu penyempurnaan baik kegiatan-kegiatan maupun besaran pagu indikatifnya guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian diharapkan Rencana Kerja yang disusun dapat mencapai sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Pontianak, Mei 2018

^ Plh. KEPALA BIRO ORGANISASI,

CHASMIATI, S.IP, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660211 198603 2 007

Lampiran Renja :

**RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR TAHUN 2019**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Keluaran	Target	Indikator Kinerja Hasil Kegiatan	Target	Lokasi	Tahun 2019	Perkiraan Maju
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		100%				591,517,000	650,668,700
a.	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang ditanggung jasa pembayaran pajaknya selama 1 tahun	2 mobil, 2 motor	1 tahun	Terbayarkannya pajak kendaraan dinas/operasional	1 tahun	Pontianak	4,800,000	5,280,000
b.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Jumlah ketersediaan materai dan buku cek untuk jasa administrasi keuangan selama 1 tahun	1.875 buah materai, 2 buku cek	1 Tahun	Kelancaran penyelesaian administrasi keuangan	1 Tahun	Pontianak	8,700,000	9,570,000
c.	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jangka waktu penyediaan makanan dan minuman peserta rapat dan pelayanan tamu Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	1 tahun	1 tahun	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat	1 tahun	Pontianak	24,000,000	26,400,000
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	- Jumlah penggandaan selama 1 tahun	50.000 lbr	1 tahun	Tersedianya hasil penggandaan	50.000 lbr	Pontianak	10,000,000	11,000,000
e.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	- Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun	1 dokumen	1 tahun	Tersedianya dokumen laporan hasil koordinasi dan konsultasi	1 dokumen	Pontianak	440,000,000	484,000,000
f.	Penataan dan Pemeliharaan Kearsipan	- Jangka waktu pelaksanaan penataan dan pemeliharaan arsip	12 bulan	12 bulan	Tertata dan terpeliharanya arsip dengan baik	12 bulan	Pontianak	104,017,000	114,418,700
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya aset Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar		100%				93,200,000	102,520,000
a.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara selama 1 tahun	2 mobil, 2 motor	1 tahun	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 tahun	Pontianak	39,200,000	43,120,000
b.	Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas Angin	- Jumlah AC yang terpelihara selama 1 tahun	11 unit	1 Tahun	Terpeliharanya AC dilingkungan Biro Organisasi	1 Tahun	Pontianak	24,000,000	26,400,000
c.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor	- Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang terpelihara selama 1 tahun	23 PC, 17 Laptop, 22 Printer	1 Tahun	Terpeliharanya peralatan/perlengkapan kantor	1 Tahun	Pontianak	30,000,000	33,000,000
3.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		100%				461,843,100	508,027,410
a.	Pendidikan dan Latihan	- Jangka waktu pelaksanaan Diklat	1 tahun	1 tahun	Terfasilitasinya PNS unuk mengikuti Diklat	1 tahun	Dalam/luar daerah	150,000,000	165,000,000
b.	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	- Jangka waktu pelaksanaan sosialisasi, bimtek dan workshop	1 tahun	1 tahun	Terfasilitasinya PNS unuk mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	1 tahun	Pontianak	109,843,100	120,827,410
c.	Pembinaan Jasmani dan Rohani	- Jangka waktu pelaksanaan pembinaan jasmani dan rohani Aparatur	1 kali	100%	Meningkatnya jasmani dan rohani aparatur	100%	Pontianak	125,000,000	137,500,000

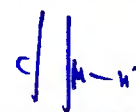
e.	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se-Kalbar	-	Jumlah hasil rumusan rekomendasi Rakor Teknis Bidang Organisasi	1 rekomendasi	Terekomendasinya rumusan Rakor Teknis bidang Organisasi	1 rekomendasi	Prov. Kalbar	100,000,000	110,000,000
f.	Fasilitasi Kelembagaan UPT dilingkungan Prov. Kalbar	-	Prosentase UPT yang telah dilakukan fasilitasi mengalami perubahan tupoksi/pembentukan UPT	5%	Terfasilitasinya perubahan tupoksi/pembentukan UPT	5%	Pontianak	150,000,000	165,000,000
g.	Penyusunan Aplikasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	-	Jumlah aplikasi kelembagaan perangkat daerah yang disusun	1 buah aplikasi	Tersedianya aplikasi kelembagaan perangkat daerah	1 buah aplikasi	Pontianak	150,000,000	165,000,000
h.	Workshop Sinkronisasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	-	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti workshop sinkronisasi penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi dan kab/kota	33 Perangkat Daeah Prov dan 14 Kab/Kota	Tersinkronisasinya penataan perangkat daerah provinsi dan kab/kota melalui kegiatan workshop	33 Perangkat Daeah Prov dan 14 Kab/Kota	Pontianak	100,000,000	110,000,000
7	Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah		Peningkatan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	100%				688,850,000	588,885,000
a.	Koordinasi Penataan Ketatalaksanaan	-	Jumlah laporan hasil koordinasi penataan ketatalaksanaan	1 laporan	Terkoordinasinya penataan ketatalaksanaan	1 laporan	Dalam/Luar Daerah	75,000,000	82,500,000
b.	Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota	-	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan terkait penataan ketatalaksanaan	7 Kab/kota	Terbina dan termonitornya kegiatan penataan ketatalaksanaan di Kab/Kota	7 Kab/kota	Prov. Kalbar	79,350,000	87,285,000
c.	Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan	-	Jumlah kebijakan bidang ketatalaksanaan yang disusun	1 pergub	Tersedianya Kebijakan bidang ketatalaksanaan	1 pergub	Pontianak	40,000,000	44,000,000
d.	Sosialisasi Bidang Ketatalaksanaan	-	Jumlah peserta sosialisasi bidang ketatalaksanaan	90 Org	Tersosialisasinya kegiatan ketatalaksanaan	100%	Pontianak	70,000,000	77,000,000
e.	Fasilitasi Evaluasi Penerapan SOP dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	-	Jumlah Perangkat Daerah dan UPT dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar yang dilakukan evaluasi terhadap penerapan pelaksanaan SOP	15 OPD dan 10 UPT	Terevaluasinya penerapan pelaksanaan SOP bagi perangkat daerah dan UPT dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	15 OPD dan 10 UPT	Pontianak	65,000,000	71,500,000
f.	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal	-	Jumlah Laporan SPM yang disusun	1 Laporan	Tersedianya laporan SPM	1 Laporan	Pontianak	84,000,000	92,400,000
g.	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	-	Jumlah Laporan SKM yang disusun	1 Laporan	Tersedianya Laporan SKM	1 Laporan	Pontianak	61,000,000	67,100,000
h.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelegaraan Pelayanan Publik se-Kalbar	-	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peyelenggaraan pelayanan publik di Prov. Kalbar	5 kab/kota	Terbina dan termonitornya penyelenggaraan pelayanan publik se-Kalbar	5 kab/kota	Prov. Kalbar	61,000,000	67,100,000

	i.	Inovasi Pelayanan Publik	-	Jumlah Inovasi pelayanan publik	12 Inovasi	Terfasilitasinya kelkutsertaan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik	12 Inovasi	Pontianak	84,000,000	92,400,000
	j.	Fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Prov. Kalbar	-	Jumlah Perangkat Daerah atau UPT yang mendapat nilai kepatuhan tinggi (zona hijau) terhadap standar pelayanan publik di Prov.Kalbar	10 Perangkat Daerah/UPT	Terfasilitasinya perangkat daerah atau UPT yang mendapat nilai kepatuhan tinggi terhadap pelayanan publik di Prov. Kalbar	10 Perangkat Daerah/UPT	Prov. Kalbar	69,500,000	76,450,000
8		Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur		Peningkatan pengembangan Sumber Daya Aparatur	100%				1,196,089,900	1,315,698,890
	a.	Fasilitasi dan Verifikasi Penyusunan Formasi PNS dilingkungan Pemerintah Prov dan Kab/Kota se-Kalbar	-	Jumlah dokumen penyusunan formasi PNS pada Perangkat Daerah Prov. Kalbar dan Kab/Kota se-kalbar yang dilakukan verifikasi	15 dokumen	Tersedianya dokumen Formasi PNS pada perangkat daerah prov. Kalbar dan Kab/Kota	15 dokumen	Pontianak	110,000,000	121,000,000
	b.	Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	-	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional yang ditetapkan	1 keputusan gubernur	Tersedianya Ketetapan Keputusan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Pro. Kalbar	1 keputusan gubernur	Pontianak	124,863,000	137,349,300
	c.	Fasilitasi dan Verifikasi Penyusunan ABK dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	-	Jumlah dokumen penyusunan ABK dilingkungan Prov. Kalbar yang dilakukan verifikasi	5 dokumen	Tersedianya dokumen ABK dilingkungan pemerintah prov. Kalbar	5 dokumen	Pontianak	124,182,000	136,600,200
	d.	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov. Kalbar periode 2019-2024	-	Jumlah dokumen Road Map Reformasi birokrasi Pemerintah Prov. Kalbar 2019-2024 yang disusun	1 dokumen	Tersedianya dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov. Kalbar 2019-2024	1 dokumen	Pontianak	124,969,400	137,466,340
	e.	Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	-	Prosentase Perangkat Daerah/UPT dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar yang menyusun dan menyampaikan Dokumen ANJAB	80%	Tarfasilitasinya penyusunan ANJAB perangkat daerah/UPT dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	80%	Pontianak	143,313,000	157,644,300
	f.	Fasilitasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ASN dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	-	Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan ASN dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar yang disusun	10 dokumen	Tersedianya dokumen Standar Kompetensi Jabatan ASN dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	10 dokumen	Pontianak	136,329,650	149,962,615
	g.	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan ANJAB dan Standar Kompetensi Jabatan ASN Kab/Kota se-Kalbar	-	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monev penyusunan ANJAB dan Standar Kompetensi Jabatan ASN	11 Kab/kota	Termonitor dan terevaluasinya penyusunan ANJAB dan SKJ ASN di Kab/Kota	11 Kab/kota	Pontianak	116,665,850	128,332,435
	h.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Setda Prov. Kalbar	-	Frekuensi kegiatan peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur setda prov. Kalbar	1 Tahun	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur setda	1 Tahun	Pontianak	90,000,000	99,000,000
	i.	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda Prov. Kalbar	-	Frekuensi kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian dilingkungan setda prov. Kalbar	1 Tahun	Terkelolanya administrasi kepegawaian ilingkungan Setda	1 Tahun	Pontianak	80,000,000	88,000,000
	j.	Pengelolaan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar	-	Jumlah pengunjung perpustakaan Setda Prov. Kalbar dalam 1 tahun	150 orang	Meningkatnya jumlah minat baca di perpustakaan Setda	150 orang	Pontianak	145,767,000	160,343,700

9	Pengembangan Pengawasan dan Akutabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan pengembangan pengawasan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	100%				345,000,000	379,500,000
a.	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar	- Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar tahun 2018 yang disusun	1 dokumen	Tersedianya dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar Tahun 2018	1 dokumen	Pontianak	98,800,000	108,680,000
b.	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar	- Jumlah dokumen Perjanjian kinerja pemerintah prov. Kalbar tahun 2019 yang disusun	1 dokumen	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar Tahun 2019	1 dokumen	Pontianak	57,000,000	62,700,000
c.	Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	- Jumlah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar yang dilakukan asistensi terkait dengan penyusunan laporan kinerja tahun 2018 dan perjanjian kinerja tahun 2019	45 Perangkat Daerah	Terasistensinya Perangkat Daerah Prov. Kalbar terhadap penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	45 Perangkat Daerah	Pontianak	36,400,000	40,040,000
d.	Pembinaan Penerapan SAKIP di daerah	- Jumlah Kab/Kota yang Menerapkan SAKIP dengan baik dan benar	9 kab/kota	Terbinanya penerapan SAKIP di Kab/Kota	9 kab/kota	Prov. Kalbar	82,800,000	91,080,000
e.	Workshosop penyusunan cascading kinerja Perangkat Daerah dilingkungn Pemerintah Prov. Kalbar	- Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Kalbar yang menyusun cascading knerja dengan baik dan benar	35 Peragkat Daerah	Tersusunnya Cascading Kinerja bagi perangkat daerah provinsi Kalbar	35 Peragkat Daerah	Prov. Kalbar	70,000,000	77,000,000
	JUMLAH SELURUHNYA						4,500,000,000	4,781,150,000

Pontianak, Mei 2018

† Pih. KEPALA BIRO ORGANISASI,



CHASMIATI, S.IP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19660211 198603 2 007